



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR

JALAN RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILE (0751) 751458

LAMAM www.kkp.go.id SUREL lrsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.100/LRSDKP/TU.330/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Sosialisasi Persiapan UPT Penyuluhan Padang

10 Februari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka meningkatkan sinergi, kerja sama dan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri acara Sosialisasi Persiapan Administrasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Padang yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Kamis/ 12 Februari 2026
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai III LRSDKP
Agenda : - Persiapan administrasi UPT Penyuluhan
- Silaturahmi bersama Penyuluh Kota Padang

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Riset Sumber Daya
dan Kerentanan Pesisir,



Rizki Anggoro Adi

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.100/LRSDKP/TU.330/II/2026
Tanggal : 10 Februari 2026

PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

No.	Nama/Jabatan
1.	Penyuluh Kota Padang
2.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial LRSDKP
3.	Plt. Kepala Urusan Umum LRSDKP
4.	Seluruh Pegawai LRSDKP

Kepala Loka Riset Sumber Daya
dan Kerentanan Pesisir,



Rizki Anggoro Adi

Persiapan Administrasi UPT Penyuluhan Bungus Padang



SEJARAH LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

2009

**Loka Riset Kerentanan Pesisir dan Laut
(LRKPL)**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NO. PER.22/MEN/2009

2011

**Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
(LPSDKP)**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NO. PER.37/MEN/2011

2017

**Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
(LRSDKP)**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NO. 20/PERMEN-KP/2017

2020

**Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
(LRSDKP)**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NO. 82/PERMEN-KP/2020





TUGAS DAN FUNGSI LRSDKP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

TUGAS LRSDKP

Melaksanakan riset sumber daya dan kerentanan pesisir

FUNGSI LRSDKP

- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
- Pelaksanaan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya, dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

LRSDKP. JL.RAYA PADANG-PAINAN KM 16 BUNGUS TELUK KABUNG



Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



BPPSDM_LRSDKP



siapdi-share



LOKASI RISET



47 Kegiatan Riset Lokasi: 58 Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4	5	5	5	5	8	1	3	3	3	5

Menteri

Badan Riset dan
SDM

Pusat Riset
Kelautan

Loka Riset Sumber
Daya dan
Kerentanan Pesisir

Instalasi
Garam Madura

OTK Lama

OTK baru

Menteri

Badan Penyuluhan
dan Pengembangan
SDM

Pusat Penyuluhan

Loka Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan
Bungus

3.1.2. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan secara teknis operasional serta pendampingan melalui pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta melaksanakan tugas teknis penyuluhan penunjuang tertentu dari organisasi induk.

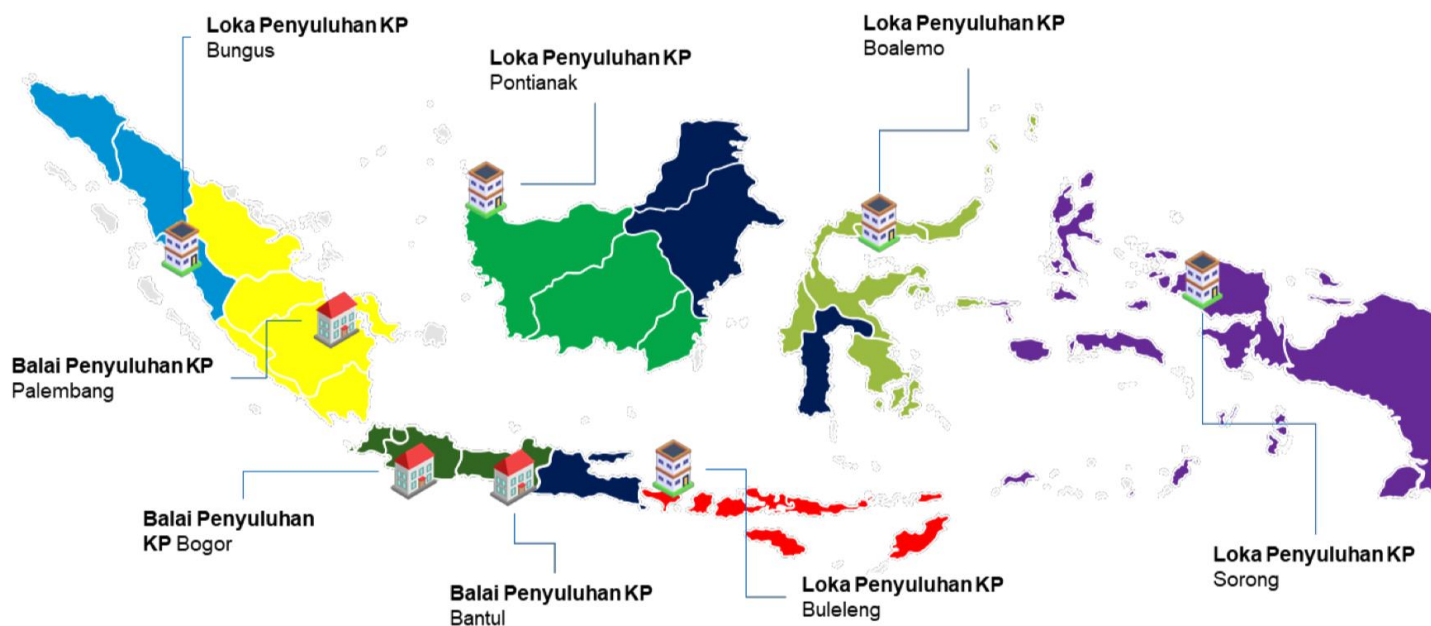
Dalam melaksanakan tugas Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program, dan anggaran serta pelaporan dibidang penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan teknis penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan informasi untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan percontohan penyuluhan berdasarkan teknologi terekomendasi spesifik lokasi;
- e. menyusun materi penyuluhan terstandar dari hasil percontohan penyuluhan;
- f. pelaksanaan pendampingan penerapan inkubasi bisnis kepada pelaku usaha dan kelompok pelaku usaha sektor KP;
- g. pelaksanaan pendampingan pelaku usaha dan pelaku pendukung dalam kelompok, gabungan kelompok, koperasi dan/atau korporasi kelautan dan perikanan

- h. pelaksanaan pembentukan serta peningkatan kapasitas kelompok kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan kemitraan nasional dan/atau internasional penyuluhan kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh kelautan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan.



Proses Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



No	Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja (Provinsi)	Jumlah Penyuluh/Pegawai (orang)
1	Balai Penyuluhan KP Palembang	Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Bengkulu, Lampung	471 (419 PP/52 Adm)
2	Balai Penyuluhan KP Bogor	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	722 (623 PP/99 Adm)
3	Balai Penyuluhan KP Bantul	DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan	922 (901 PP/21 Adm)
4	Loka Penyuluhan KP Pontianak	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, , Kalimantan Selatan	356 (311 PP/45 Adm)
5	Loka Penyuluhan KP Padang	Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,	419 (419 PP/46 Adm)
6	Loka Penyuluhan KP Buleleng	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	409 (339 PP/70 Adm)
7	Loka Penyuluhan KP Boalemo	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara	506 (506 PP/42 Adm)
8	Loka Penyuluhan KP Sorong	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan	369 (316 PP/54 Adm)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



Rabu, 3 September 2025

Audiensi Dengan Bapak Gubernur Sumbar Terkait
Permohonan Rekomendasi Perubahan SOTK dari Loka
Riset ke Loka Penyuluhan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



BPPSDM_LRSDKP



siapdi-share.com



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 9 September 2025

Nomor : 523/657/DPK/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Dukungan terhadap Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Kepada:

Yth. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor: B.1875/BPPSDM/OT.210/VIII/2025 perihal Permohonan Dukungan Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dimana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengubah nomenklatur, tugas, dan fungsi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menjadi Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, bersama ini kami memberikan **Dukungan** atas perubahan nomenklatur tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

Transisi dari satker riset ke penyuluhan

Selama proses kelembagaan ini LRSDKP telah mempersiapkan diri untuk perubahan dari sebelumnya satuan kerja riset menjadi satuan kerja penyuluhan baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta terlibat dalam kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi dari penyuluhan

- menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Penyuluh Sumatera Barat dalam rangka silaturahmi dan pemberian arahan Bapak Sekretaris BPPSDMKP disela-sela kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Tanggap Bencana Sumatera Barat
- melaksanakan pendampingan Penyuluh Perikanan dalam rangka tanggap darurat bencana Gunung Marapi
- memfungsikan bangunan gedung kantor untuk kegiatan penyuluhan
- audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan proses perubahan kelembagaan dan kegiatan penyuluhan di Provinsi Sumatera Barat



[bpsdm_lrsdkp](#)



1 Jun 2024 10.36.13

-0°30'1,212"S 100°33'26,646"E ±1,90m

FHX4+VW5, Ili Koto, Kec. Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27271, Indonesia



GPS Map Camera

Kecamatan Tanjung Emas, Sumatera Barat, Indonesia

JLN PINANG, Jl. Ludai, Pagaruyung, Kec. Tj. Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27211, Indonesia

Lat -0.452188°

Long 100.606098°

01/06/24 06:19 PM GMT +07:00



GPS Map Camera

Padang Ganting, West Sumatra, Indonesia

FP53+FXG, Padang Ganting, Tanah Datar Regency, West Sumatra 27281, Indonesia

Lat -0.542499°

Long 100.702618°

01/06/24 02:06 PM GMT +07:00



GPS Map Camera

Sungai Tarab, West Sumatra, Indonesia

HH6J+F92, Simpuruik, Sungai Tarab, Tanah Datar Regency, West Sumatra 27261, Indonesia

Lat -0.438813°

Long 100.58084°

31/05/24 04:29 PM GMT +07:00



25 KKP
KEKAMPUNG KEMERDEKAAN



GPS Map Camera



GPS Map Camera

Kecamatan Padang Teras, Simalang Baris, Indonesia
3301+CSA, Jln. Des. Kinc. Padang Ter., Kota Padang, Sumatera Barat 28125, Indonesia
Tel: 0808850
Long: 800-562707
KIKKITA 12.29 04 MAY 2024

#2024
KKP BEYOND



25 KKP
KEKAMPUNG KEMERDEKAAN



Will Document

#2024
KKP BEYOND



1. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)



Instagram, Youtube

2. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)

3. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)



1. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)



Instagram, Youtube

2. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)

3. Jaka Ward Sumbak (Dip. dan Berencana Perairan)

Implementasi pada kantor LRSDKP

Siapa yang terdampak	Apa Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
Seluruh pegawai kantor LRSDKP Padang	Mampu memahami proses bisnis penyuluhan sebagai persiapan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi baru dari sebelumnya tugas dan fungsi riset menjadi tugas penyuluhan	Membaca dan memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
		Membaca dan memahami Peraturan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Penyuluh Perikanan Bantu
		Membaca dan memahami Programa Penyuluhan Perikanan Nasional Tahunan sebagai pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

Melibatkan seluruh SDM kantor LRSDKP Padang dalam kegiatan lapangan percontohan di lokasi SFV Desa

Implementasi Percontohan Penyuluhan UPT Penyuluhan Bungus Padang

12
SFV UPT

Wisata Bahari
Jorong Sikabau Desa Ranah Koto Tinggi, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat

Nila & Gabus
Desa Mariana, Kec. Banyuasin, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan

Nila & Gabus
Desa Patra Tani, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan

Nilem
Desa Linau, Kec. Maje, Kota Kaur, Bengkulu

Udang Vaname
Desa Banten, Kec. Kasemen, Kota Seran, Banten

Ikan Hias
Desa Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Budidaya Ikan Air Tawar
Desa Pasir Jawa, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

Nila
Desa Mangunegara, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah

Patin
Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Pemuliaan Ikan
Desa Rancamulya, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, Jawa Barat

Mina Padi
Desa Panembangan, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Koi
Desa Sumberdodol, Kec. Panekan, Kab. Magetan, Jawa Timur

Garam
Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, Jawa Timur

Wanamina & Minapadi
Kab. Maros, Sulawesi Selatan

Marikultur
Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali

Teknologi Kelautan
Desa Patuno, Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Lobster
Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku

Rumpit Laut
Desa Tabulo Selatan, Kec. Manangu, Kab. Boalemo, Gorontalo

Udang & Bandeng
Desa Ajakkang, Kec. Sopeng Raja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan

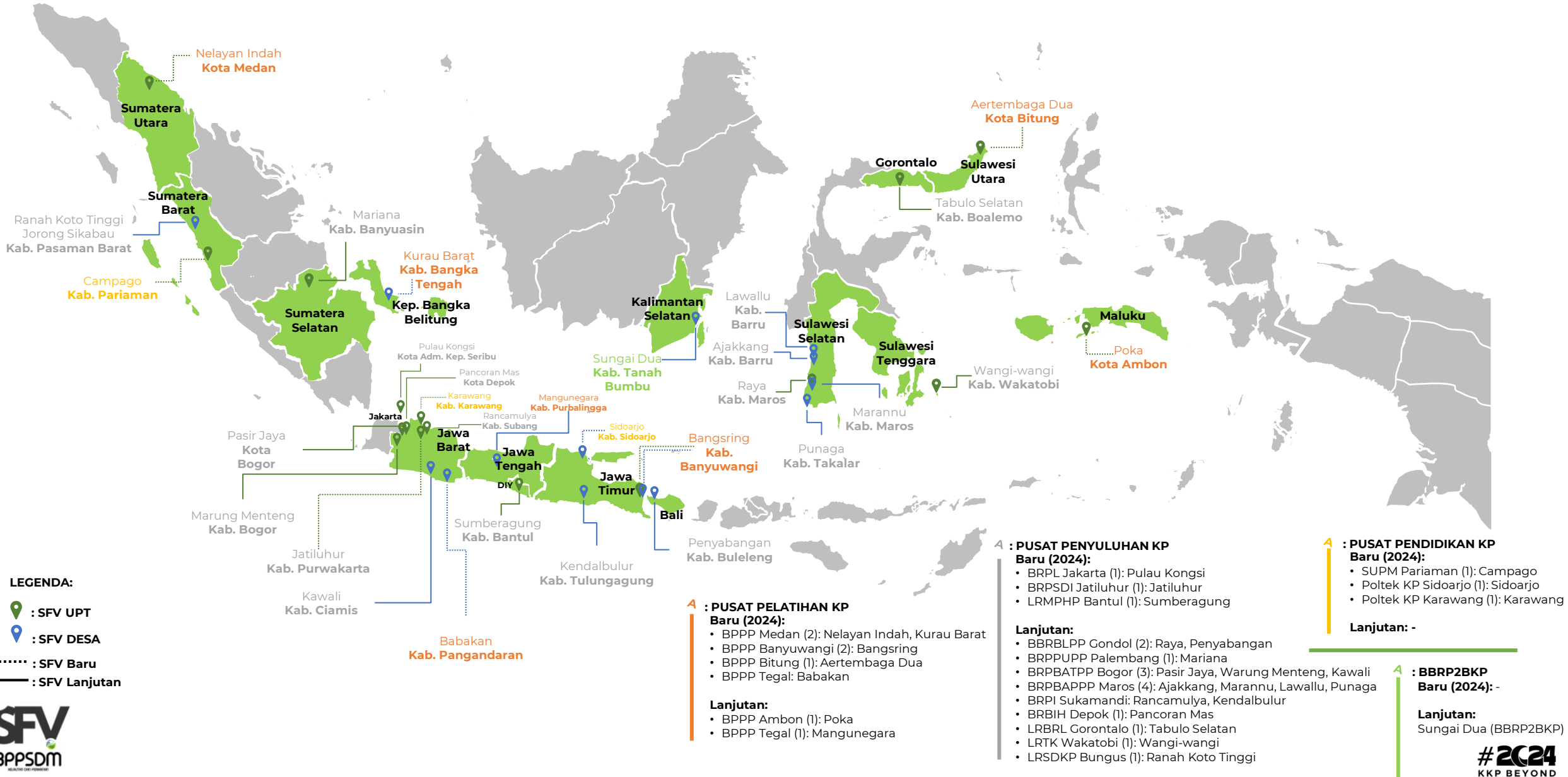
Udang Vaname
Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali

Patin
Desa Kendalbubur, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jawa Timur

SFV berbasis Desa
SFV berbasis UPT

12

Peta Sebaran SFV BPPSDMKP 2024



Pemanfaatan SDM & Sarpras untuk Percontohan Penyuluhan

SDM Penyuluhan

SDM Jabfung Penyuluh BP3 Medan

12 orang Penyuluh Perikanan Pasaman Barat

1 orang Penyuluh (aktif) wilayah Kecamatan Koto Balingka

SDM LRSDKP

14 orang (5 PNS, 6 PPNP, 3 PJLP)

Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Teknologi Informasi

Peralatan dan Mesin

- Alat Pengolah Data
- Alat Multimedia dan Teknologi Informasi
- Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda Dua

Gedung dan Bangunan Semi Permanen

- Posko Pusat Pelayanan Informasi



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

25 KKP

KKP
2025



Pelatihan dengan tema sesuai aspirasi masyarakat





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

26 KKP

KKP
2025



Pendampingan Penyuluh



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

26 KKP

KKP
2025



Pendampingan Kelompok

Mendampingi langsung dan memfasilitasi kelompok ke ibukota kecamatan dalam pengurusan izin PIRT



Koordinasi Lintas Sektor Pemerintah Daerah



(1) Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat, (2) Kepala Jorong Sikabau dan Plt. Wali Nagari Ranah Koto Tinggi, (3) Bupati dan Ketua DPRD Pasaman Barat dan (4) Camat Koto Balingka



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

26 KKP

KKP
2025



Pengerahan seluruh sumber daya yang ada



Memberdayakan SDM dan aset kantor dalam kegiatan di lokasi SFV

Pembangunan Posko Informasi SFV Desa Wisata Bahari



Posko Informasi ini merupakan output dari hasil penyuluhan wisata bahari yang dibangun secara gotong royong melibatkan seluruh anggota kelompok

Terima Kasih

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

26 KKP

KKP
2025

